

**ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA PADANG
(Studi Kasus Pada Kecamatan Padang Selatan)**

SKRIPSI

**untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**



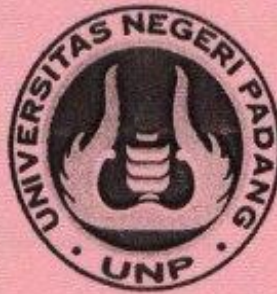
**SUPRIADI
13151/2009**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

**ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA PADANG
(Studi Kasus di Kecamatan Padang Selatan)**

SKRIPSI

**untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**



**SUPRIADI
NIM 13151/2009**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Judul Analisis Kualitas Lingkungan Kawasan
: Permukiman Kumuh Kota Padang (Studi Kasus di
Kecamatan Padang Selatan)

Nama : Supriadi
NIM : 13151/2009
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2016

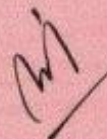
Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 196206031986032001

Pembimbing II,



Drs. Zawirman
NIP. 196006161989132001

Ketua Jurusan,



Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 196206031986032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : SUPRIADI

Nim : 13151/2009

**Dinyatakan lulus setelah mempertahankan skripsi didepan Tim Penguji
Program Studi Pendidikan Geografi
Jurusan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
dengan judul**

**Analisis Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Padang
(Studi Kasus di Kecamatan Padang Selatan)**

Padang, Februari 2016

Tim Penguji

1. Ketua : Dra. Yurni Suasti, M.Si

2. Sekretaris : Drs. Zawirman

3. Anggota : Ahyuni, ST, M.Si

4. Anggota : Dra. Endah Purwaningsih, M.Sc

5. Anggota : Febriandi, S.Pd, M.Si

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.



**UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI**

Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang-25131 Telp. 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriadi
NIM/TM : 13151/2009
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul:

**Analisis Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota
Padang (Studi Kasus Kecamatan Padang Selatan)**

Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

**Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Geografi**

Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

Saya yang menyatakan,



Supriadi

NIM. 13151/2009

ABSTRAK

SUPRIADI (13151/2009). Analisis Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Padang (Studi Kasus Kecamatan Padang Selatan). Program Studi Pendidikan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas lingkungan permukiman yang dilihat dari kriteria kondisi bangunan, kependudukan serta prasarana, dan tingkat kekumuhan permukiman yang ada di Kecamatan Padang Selatan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Wilayah penelitian di tiga Kawasan dengan sampel responden sebanyak 98 responden . Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, studi dokumentasi, wawancara, studi literatur dan angket.

Hasil penelitian ini adalah (1) Kepadatan bangunan berada pada tingkat jarang, (2) Jarak antar bangunan berada pada tingkat sedang, (3) Kepadatan penduduk berada pada tingkat padat (4) Tingkat pendidikan kepala keluarga pada Kawasan Batang Arau dan Seberang Palinggam rendah, sementara Kawasan Seberang Padang Tinggi (5) Kondisi jalan Kawasan Batang Arau dan Seberang Padang Baik, sedangkan Kawasan Seberang Palinggam rusak (6) Kondisi saluran drainase Kawasan Batang Arau buruk, Seberang Palinggam dan Seberang Padang sedang (7) Saluran pembuangan jamban Kawasan Batang Arau dan Seberang Palinggam buruk, Seberang Padang baik (8) Sumber air bersih Kawasan Batang Arau dan Seberang Palinggam yakni air hujan dan sumur, sedangkan Kawasan Seberang Padang PDAM (9) Pengelolaan sampah Kawasan Seberang Padang dan Seberang Palinggam baik, sedangkan Kawasan Batang Arau masih buruk. Berdasarkan *score* total didapatkan hasil tingkat kekumuhan permukiman Kawasan Batang Arau adalah tinggi (370), Kawasan Seberang Palinggam sedang (350) dan Kelurahan Seberang Padang rendah (230).

Kata Kunci : Kualitas Lingkungan, Permukiman Kumuh¹

KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia - Nya, serta kesehatan sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Padang (Studi Kasus di Kecamatan Padang Selatan)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhamad SAW. Rasa hormat, cinta dan sayang setulusnya serta terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suwardi dan Ibunda Supik, untuk semua doa, kasih sayang, nasehat, semangat dan dukungan, yang telah diberikan. Abang dan adik-adik yang Penulis sayangi, bang Zulham Efendi, S.H, Salmi Fitri, Anisa Fitriani, Zahratul Jannah serta Putri Muhaiminah Asy.syifa,S.Pd yang telah memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, waktu, nasehat dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan FIS UNP serta staff Tata Usaha yang telah membantu Penulis dalam proses izin Penelitian.
2. Ibu Dra. Yurni Suasti, M.Si selaku Ketua Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang dan Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis selama proses penulisan skripsi ini.

3. Ibu Ahyuni, S.T, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang sekaligus sebagai Penguji yang telah memberikan kritik dan arahan terhadap skripsi ini.
4. Bapak Nofrion, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang.
5. Seluruh Staff Dosen Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Drs. Zawirman, selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan arahan terhadap skripsi ini.
7. Bapak Febriandi, S.Pd, M.Si , Ibu Dra. Endah Purwaningsih, M.Sc selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan arahan terhadap skripsi ini.
8. Tim Penelitian, Putri Muhaiminah Asy.syifa, S.Pd, Roni Haryadi, S.Si, Matur Prasajo, S.Pd, dan Anita Sandra, S.Pd yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, serta memberikan nasehat dan dukungan selama masa penelitian.
9. Sahabat-sahabat SMK dan teman-teman LK yang selalu ada membantu, meluangkan waktu, memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Skripsi ini disusun dengan segenap kemampuan dan kerja keras Penulis. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padang, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	10
1. Kawasan Permukiman Kumuh	10
a. Pengertian Perumahan dan Permukiman	10
b. Permukiman Kumuh	11
c. Kawasan Permukiman	12
d. Kawasan Permukiman Kumuh.....	12
e. Tipologi Permukiman kumuh	12
f. Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh	14

2. Kualitas Lingkungan Permukiman	15
a. Karakteristik Permukiman.....	15
1) Kondisi Fisik Bangunan	15
a) Kepadatan Bangunan.....	16
b) Jarak Antar Bangunan	16
2) Kondisi Kependudukan	17
a) Tingkat Kepadatan Penduduk.....	17
b) Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga.....	18
3) Prasarana	19
a) Kondisi Jalan	19
b) Drainase.....	22
c) Sumber Air Minum.....	23
d) MCK.....	24
e) Pengelolaan Sampah.....	25
3. Sistem Pengindraan Jauh	28
a. Pengindraan Jauh	28
b. Citra.....	28
c. Pengertian Interpretasi Citra.....	29
d. Citra <i>Quickbird</i>	29
e. Analisis <i>Overlay</i> (Tumpang Susun)	34
B. Penelitian Relevan	35
C. Kerangka Konseptual	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	40
D. Variabel Penelitian dan Sumber Data	46
E. Definisi Operasional Variabel dan Indikator	48
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	49
G. Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis	53
1. Letak, Luas, dan Batas	53
2. Kependudukan.....	55
B. Hasil Penelitian	57
1. Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh	58
a. Kondisi Bangunan.....	58
1) Kepadatan Bangunan.....	58
2) Jarak Antar Bangunan	60
b. Kependudukan	61
1) Kepadatan Penduduk.....	61
2) Tingkat Pendidikan	61
c. Prasarana	63
1) Kondisi Jalan	63
2) Drainase.....	68

3) MCK.....	74
4) Sumber Air Bersih.....	76
5) Pengelolaan Sampah	79
2. Analisis Kualitas Lingkungan Permukiman.....	81
C. Pembahasan	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kawasan Kumuh di Kota Padang	5
Tabel 2. Populasi Kawasan Kumuh di Kota Padang.....	40
Tabel 3. Sampel Penelitian di Kecamatan Padang Selatan	42
Tabel 4. Variabel, Indikator, Sumber dan Pengolahan Data	47
Tabel 5. Sumber Data Penelitian	48
Tabel 6. Parameter dan Variabel Penelitian	51
Tabel 7. Nilai Rentang dan Penentu Kawasan Kumuh	52
Tabel 8. Klasifikasi Tingkat Kekumuhan	52
Tabel 9. Luas Kecamatan Padang Selatan	53
Tabel 10. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin	55
Tabel 11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur	56
Tabel 12. Luas Permukiman Kumuh di Kecamatan Padang Selatan	57
Tabel 13. Luas Permukiman Kumuh (<i>Ground Cek</i> dan Delineasi)	57
Tabel 14. Tingkat Kepadatan Penduduk	61
Tabel 15. Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga	62
Tabel 16. Kondisi Jalan Lingkungan	63
Tabel 17. Kondisi Drainase	68
Tabel 18. Kepemilikan Tempat MCK Masyarakat	74
Tabel 19. Saluran Pembuangan MCK Masyarakat	75
Tabel 20. Sumber Air Bersih Masyarakat	76
Tabel 21. Ketersediaan Air bersih	77

Tabel 22. Pengelolaan Sampah	79
Tabel 23. <i>Scoring Total</i> Seluruh Variabel	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Analisis <i>Overlay</i>	34
Gambar 2. Kerangka Konseptual	38
Gambar 3. Peta Sebaran Sampel Kawasan Batang Arau	43
Gambar 4. Peta Sebaran Sampel Kawasan Seberang Palinggam	44
Gambar 5. Peta Sebaran Sampel Kawasan Seberang Padang	45
Gambar 6. Peta Administrasi Kecamatan Padang Selatan	54
Gambar 7. Peta Kepadatan Bangunan	59
Gambar 8. Kondisi Jalan dalam Kondisi Baik	64
Gambar 9. Kondisi Jalan Kondisi Rusak	64
Gambar 10. Peta Kondisi Jalan Kawasan Batang Arau	65
Gambar 11. Peta Kondisi Jalan Kawasan Seberang Palinggam	66
Gambar 12. Peta Kondisi Jalan Kawasan Seberang Padang	67
Gambar 13. Kondisi Drainase	70
Gambar 14. Peta Kondisi Drainase Kawasan Batang Arau	71
Gambar 15. Peta Kondisi Drainase Kawasan Seberang Palinggam	72
Gambar 16. Peta Kondisi Drainase Kawasan Seberang Padang	73
Gambar 17. Kondisi Jamban	74
Gambar 18. Sumber air bersih	78
Gambar 19. Kondisi Sampah	80
Gambar 20. Peta Tingkat Kekumuhan Permukiman	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lingkungan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk baik karena faktor pertumbuhan penduduk secara alami maupun proses urbanisasi. Berdasarkan hasil sensus penduduk, pertumbuhan penduduk Sumatera Barat mengalami peningkatan yakni 0,63 pada tahun 1990-2000 menjadi 1,34 pada tahun 2000-2010. Secara tidak langsung, hal ini menyebabkan kebutuhan akan perumahan dan permukiman juga meningkat.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi penambahan fasilitas, sarana, prasarana cenderung membentuk permukiman yang sangat padat. Permukiman penduduk yang sangat padat memberikan peluang atau penyebab kondisi lingkungan kota menjadi buruk/menurun. Kapasitas ruang yang ada tidak mampu melayani rumah penduduk secara layak sehingga muncul permukiman kumuh.

Menurut Neolaka (2008) mengatakan bahwa apabila terjadi kerusakan lingkungan tetapi kehidupan penduduk tidak merasa terganggu, maka dengan kata lain terdapat permasalahan lingkungan bila penduduk yang berada di sekitar lingkungan tersebut mengalami kesulitan hidup akibat masalah lingkungan itu. Hal yang sangat erat kaitannya terhadap kesulitan hidup pada umumnya yakni pendidikan, pekerjaan, ketersediaan sarana prasarana sehingga menyebabkan kemampuan terhadap penyediaan kehidupan yang lebih baik

dalam segi kepemilikan bangunan yang layak dan penguasaan atas tanah yang ada menjadi rendah.

Secara sederhana permukiman kumuh lebih mengarah kepada aspek lingkungan dimana suatu komunitas tinggal, kepemilikan terhadap tanah didominasi oleh hak milik yang sebagian besar berasal dari tanah girik dan sebagian kecil merupakan tanah milik negara yang belum dibangun kemudian digunakan untuk tempat tinggal bagi sebagian masyarakat miskin yang kemudian berkembang menjadi permukiman kumuh.

Kota Padang sebagai Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari masalah permukiman. Jumlah Penduduk Kota Padang dari tahun 2010 hingga tahun 2013 juga mengalami peningkatan yakni 833.562 jiwa menjadi 876.678 jiwa. Hal ini menyebabkan kebutuhan terhadap perumahan lebih meningkat dari tahun ke tahun.

Perkembangan jumlah hunian cenderung mengabaikan aturan-aturan dasar tentang pengadaan bangunan rumah seperti kualitas bahan, jenis ruang, garis sempadan jalan maupun jarak antar rumah, bahkan mereka menggunakan bahu jalan untuk dijadikan bangunan untuk pengembangan tempat tinggal maupun usahanya yang menyebabkan permukiman tersebut menjadi kumuh dan suasana yang tidak tertib yang berakibat pada berubahnya kualitas lingkungan fisik kawasan. Perubahan kualitas lingkungan fisik kawasan akibat aktivitas permukiman ditandai dengan terjadinya kerusakan lingkungan seperti ketidaksesuaian tampilan bangunan hunian yang semi permanen maupun tidak permanen dengan bangunan formal yang ada di sekitarnya, berkurangnya

kenyamanan dan luasan sarana jalan karena sebagian badan jalan didirikan bangunan ataupun digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti menjemur kain dan sebagainya, serta sungai yang dijadikan tempat pembuangan ataupun hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi dasarnya serta tidak adanya penghijauan maupun ruang terbuka hijau pada halaman rumah karena masyarakat menjadikan halaman sebagai pengembangan bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Menurut Badan Perencanaan Daerah Kota Padang dalam Panduan Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) tahun 2013 menetapkan beberapa kriteria permukiman kumuh antara lain (1) berada pada peruntukan RTRW Kota/Kabupaten, (2) kepadatan penduduk > 400 jiwa untuk Kota kecil, > 500 untuk Kota besar dan sedang, dan > 750 untuk Kota metropolitan, (3) rumah tidak layak huni > 60%, (4) angka penyakit yang tinggi akibat buruknya lingkungan permukiman, (5) intensitas permasalahan sosial cukup tinggi, (6) ketersediaan prasarana umum di bawah standar minimal, (7) rawan bencana seperti banjir dan lain-lain. Menurut Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen dalam Negeri menetapkan ciri-ciri permukiman kumuh antara lain, (1) sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah (2) sebagian besar penduduknya

bekerja pada sektor informal. lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarananya dibawah standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki a) kepadatan penduduk yang tinggi 200 jiwa/ha, b) kepadatan bangunan 110 bangunan/ha, c) kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan), d) kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, e) kondisi bangunan rumah tidak permanen, f) rawan bencana, kebakaran, penyakit dan keamanan, g) berpotensi menimbulkan ancaman (fisik dan non fisik).

Permukiman kumuh di perkotaan biasanya terdapat di atas tanah negara, tanah milik Pemerintah Kota yang sudah dikukuhkan dengan hak pengelolaan ataupun yang belum dikukuhkan, tanah bantaran sungai, tanah instansi pemerintah, tanah milik PT. Kereta Api Indonesia, dan sebagainya. Hal ini diperkuat berdasarkan karakteristik lokasi permukiman oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA, 2014) yang menyatakan bahwa permukiman yang layak tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/danau/mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan.

Undang-Undang tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 81 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melaksanakan pengendalian dalam penyelenggaraan kawasan permukiman mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. Pada pasal 95 menyebutkan bahwa pencegahan

terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru yakni (a) ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi, (b) ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum, (c) penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum, (d) pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang (RP3KP) tahun 2013, terdapat 22 kawasan yang tersebar di hampir seluruh Kecamatan di Kota Padang. Sebaran kawasan kumuh tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kawasan Kumuh di Kota Padang

No.	Kecamatan	Kawasan	Luas (ha)	Total Luas (ha)
1.	Koto Tangah	Koto Panjang Ikur Koto	7,35	11,57
		Dadok Tunggul Hitam	4,22	
2.	Kuranji	Kalumbuk	1,28	7,72
		Lubuk Lintah	1,25	
		Ampang	5,19	
3.	Padang Barat	Purus	1,8	1,8
4.	Padang Utara	Alai Parak Kopi	5,43	5,43
5.	Padang Selatan	Seberang Palinggam	5,55	35,19
		Seberang Padang	5,03	
		Mata Air	4,1	
		Pasa Gadang	3,8	
		Batang Arau	15,71	
6.	Padang Timur	Jati	1,37	10,35
		Parak Gadang Timur	3,19	
		Sawahen Timur	4,35	
		Kubu Marapalam	1,48	
7.	Nanggalo	Surau Gadang	3,1	8,4
		Kurao Pagang	5,3	
8.	Lubuk Begalung	Kampung Jua	8,24	14,01
		Batuang Taba	5,87	
9.	Bungus Teluk Kabung	Teluk Kabung Tengah	5,13	7,26
		Teluk Kabung Utara	2,13	

Sumber : Bappeda Kota Padang, 2013.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kawasan kumuh terluas terdapat di Kecamatan Padang Selatan, hal ini menjadi suatu daya tarik bagi peneliti untuk melihat kondisi yang ada di lapangan berupa kualitas lingkungan yang akan dilihat dari karakteristik permukimannya yang meliputi: bangunan, kependudukan dan juga prasarana yang ada di Kecamatan Padang Selatan tersebut. Berdasarkan identifikasi yang dilihat dari konsep pedoman identifikasi kawasan permukiman kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di antaranya yakni, (1) kepadatan bangunan, (2) jarak antar bangunan, (3) kepadatan penduduk, (4) pendidikan, (5) kondisi jalan lingkungan, (6) kondisi saluran drainase, (7) sumber air bersih, (8) saluran pembuangan jamban, (9) pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian di atas yaitu tentang perkembangan daerah permukiman kumuh yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk serta adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur agar tidak berkembangnya permukiman kumuh tersebut dan banyaknya permukiman kumuh yang terdapat di Kota Padang. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permukiman kumuh di Kota Padang sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Padang (Studi Kasus Pada Kecamatan Padang Selatan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang ada dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian tata ruang permukiman Kota Padang?
2. Bagaimana tingkat kepadatan bangunan kawasan permukiman kumuh Kota Padang?
3. Bagaimana jarak antar bangunan kawasan permukiman kumuh Kota Padang?
4. Bagaimana kepadatan penduduk kawasan permukiman kumuh Kota Padang?
5. Bagaimana pertumbuhan penduduk kawasan permukiman kumuh Kota Padang?
6. Bagaimana tingkat pendidikan penduduk kawasan permukiman kumuh Kota Padang?
7. Bagaimana status kepemilikan tanah di kawasan permukiman kumuh Kota Padang?
8. Bagaimana kondisi jalan lingkungan kawasan permukiman kumuh Kota Padang?
9. Bagaimana kondisi drainase kawasan permukiman kumuh Kota Padang?
10. Bagaimana kondisi air minum kawasan permukiman kumuh Kota Padang?
11. Bagaimana kondisi air limbah kawasan permukiman kumuh Kota Padang?
12. Bagaimana kondisi persampahan kawasan permukiman kumuh Kota Padang?

13. Bagaimana kondisi tapak bangunan permukiman kumuh di Kota Padang ?
14. Berapa pendapatan masyarakat permukiman kumuh Kota Padang?
15. Bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di permukiman kumuh Kota Padang?
16. Berapa luas pekarangan pada permukiman kumuh Kota Padang?
17. Bagaimana tingkat kriminalitas di Kota Padang?
18. Berapa lama tinggal masyarakat di Permukiman Kumuh Kota Padang?
19. Bagaimana kepedulian masyarakat yang bertempat tinggal di Permukiman kumuh Kota Padang terhadap keadaan lingkungan?
20. Bagaimana tingkat kekumuhan pada permukiman kumuh Kota Padang?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas masalah penelitian ini dibatasi yaitu, karakteristik kawasan permukiman kumuh (bangunan, kependudukan, dan sarana prasarana) Kota Padang dan tingkat kekumuhan permukiman kumuh Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik kawasan permukiman kumuh Kota Padang?
2. Bagaimana tingkat kekumuhan permukiman kumuh Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Khusus

Mendeskripsikan karakteristik permukiman kumuh yang meliputi :

- a. Tingkat kepadatan bangunan di kawasan permukiman kumuh Kota Padang.
- b. Jarak antar bangunan di kawasan permukiman kumuh Kota Padang.
- c. Kepadatan penduduk di kawasan permukiman kumuh Kota Padang.
- d. Tingkat pendidikan penduduk di kawasan permukiman kumuh Kota Padang.
- e. Kondisi jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh Kota Padang.
- f. Jaringan saluran drainase di kawasan permukiman kumuh Kota Padang.
- g. Sumber air minum di kawasan permukiman kumuh Kota Padang.
- h. Saluran pembuangan jamban di kawasan permukiman kumuh Kota Padang.
- i. Pengelolaan sampah di kawasan permukiman kumuh Kota Padang.

2. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh berupa tingkat kekumuhan permukiman kumuh Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat setelah dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir pada Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- 2. Untuk mengembangkan kemampuan menulis bagi peneliti.
- 3. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Padang dalam permasalahan permukiman kumuh Kota Padang.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kawasan Permukiman Kumuh

a. Pengertian Perumahan dan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Pengertian permukiman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasann pedesaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992, permukiman mengandung pengertian sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kata permukiman berasal dari terjemahan kata *human settlements* yang mengandung pengertian suatu proses bermukim yang mengandung unsur dimensi waktu dalam prosesnya (Suparno dan Endy, 2006).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permukiman adalah lingkungan hunian yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan kehidupan masyarakat di dalamnya.

b. Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011).

Menurut Bappeda, perumahan dan permukiman kumuh memiliki kriteria lokasi berdasarkan panduan program penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK) Tahun 2013, dengan kriteria yang terbagi dalam kriteria umum dan wajib sebagai berikut:

- 1) Berada pada peruntukan permukiman dalam RT/ RW Kota/ Kabupaten.
- 2) Kepadatan penduduk > 400 jiwa untuk kota kecil, >500 jiwa untuk kota besar, dan > 750 jiwa untuk kota metropolitan.
- 3) Rumah tidak layak huni sebanyak > 60%.
- 4) Angka penyakit akibat buruknya lingkungan permukiman cukup tinggi (demam berdarah, diare, ISPA, dan lain-lain).
- 5) Intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi, misalnya (*urban crime*, keresahan serta kesenjangan yang tajam).
- 6) Ketersediaan prasarana utilitas (PSU) di bawah standar pelayanan minimal.
- 7) Rawan Bencana, misalnya banjir, tanah longsor dan kebakaran.

c. Kawasan Permukiman

Pengertian kawasan permukiman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

d. Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman kumuh bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun non perkotaan yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

e. Tipologi Permukiman Kumuh

Terdapat beberapa tipologi permukiman kumuh yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) antara lain:

- 1) Permukiman kumuh nelayan, yaitu permukiman yang terletak di luar area antara garis pasang tertinggi dan terendah. Sebagian mata pencaharian masyarakat adalah nelayan dan atau yang terkait dengan nelayan.
- 2) Permukiman kumuh dekat pusat kegiatan sosial ekonomi, yaitu permukiman yang terletak di sekitar pusat-pusat aktivitas pelayanan sosial

ekonomi, seperti halnya lingkungan industri, lingkungan pusat pelayanan ekonomi, lingkungan pendidikan atau kampus. Jenis mata pencaharian masyarakatnya terkait erat dengan domain kegiatan pusat sosial ekonomi terkait.

- 1) Permukiman Kumuh di Pusat Kota, yaitu permukiman yang terletak ditengah kota (*urban core*) yang merupakan permukiman lama/ kuno yang diindikasikan mempunyai warisan budaya tinggi dalam konfigurasi kota lama. Jenis mata pencaharian masyarakatnya beragam, diantaranya adalah buruh, pedagang kecil, wiraswasta, industri rumah tangga, jasa transportasi, dan lain-lain.
- 2) Permukiman Kumuh di Pinggiran Kota, yaitu permukiman yang terletak di luar pusat kota (*urban fringe*), yang umumnya merupakan permukiman yang tumbuh dan berkembang sebagai konsekuensi dari perkembangan kota, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi. Jenis mata pencaharian masyarakatnya buruh, pedagang kecil, wiraswasta, industri rumah tangga, jasa transportasi, dan lain-lain.
- 3) Permukiman Kumuh di Daerah Pasang Surut, yaitu permukiman yang terletak di area antara garis pasang tertinggi dan terendah yang secara berkala selalu terendam air pasang. Sebagian tipe bangunan yang ada adalah tipe panggung dengan jalan titian sebagai penghubung antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya. Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan atau yang terkait

dengan nelayan, namun kegiatan yang tidak terkait langsung dengan penangkapan ikan dilakukan di luar kawasan.

- 4) Permukiman Kumuh di Daerah Rawan Bencana, yaitu permukiman yang terletak di area rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi, dan banjir.
- 5) Permukiman Kumuh di Tepi Sungai, yang meliputi dua tipe, yaitu:
 - a) Tipe pertama, yaitu permukiman kumuh yang terletak di luar garis sempadan sungai baik yang bertanggul maupun tidak.
 - b) Tipe kedua, yaitu permukiman kumuh lama yang secara historis berada di area badan sungai bagian tepi sampai tepi sungai karena menempatkan sungai sebagai sarana transportasi vital. Tipe bangunan adalah rakit, panggung, dan bidang lantai langsung berhubungan dengan tanah.

f. Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh

Menurut Srinivas (2003) timbulnya kawasan permukiman kumuh diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Faktor Internal: faktor budaya, agama, kerja, tempat lahir, lama tinggal, investasi rumah dan jenis bangunan.
- 2) Faktor Eksternal: kepemilikan tanah dan kebijakan pemerintah.

Menurut Khomarudin (1997) faktor utama timbulnya permukiman kumuh, yaitu:

- 1) Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- 2) Sulit mencari pekerjaan.
- 3) Sulitnya mencicil atau menyewa rumah.
- 4) Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan.
- 5) Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah.
- 6) Disiplin warga yang rendah.
- 7) Kota sebagai pusat perdagangan yang menarik bagi para pengusaha.
- 8) Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.

2. Kualitas Lingkungan Permukiman

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk mengidentifikasi kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan sehingga dikategorikan kedalam kawasan permukiman kumuh yakni dengan melihat beberapa variabel dengan indikator yang meliputi, (1) kepadatan bangunan, (2) jarak antar bangunan, (3) kepadatan penduduk, (4) pendidikan, (5) kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase, sumber air minum, saluran pembuangan jamban/WC dan kondisi persampahan. Berikut ini penejelasan kualitas lingkungan permukiman dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

a. Karakteristik Permukiman

1) Kondisi Fisik Bangunan

Menurut Mantra (2009) bangunan fisik adalah tempat perlindungan tetap maupun sementara yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik digunakan untuk tempat tinggal atau bukan tempat tinggal.

a) Kepadatan Bangunan

Kepadatan Bangunan merupakan salah satu indikator untuk menghitung penurunan kualitas lingkungan yang terjadi pada suatu kawasan. Kepadatan bangunan dihitung dengan membagi jumlah seluruh bangunan yang ada dengan luas lahan yang terdapat dalam suatu kawasan yang telah dideleniasi.

Berdasarkan konsep pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan Departemen Pekerjaan Umum (2006) menjelaskan kepadatan bangunan terbagi menjadi tiga yakni a) kepadatan bangunannya lebih dari 100 rumah per hektar, b) kepadatan bangunannya mencapai antara 60 sampai 100 rumah per hektar, c) kepadatan bangunannya kurang dari 60 rumah per hektar.

b) Jarak Antar Bangunan

Jarak antar bangunan merupakan perhitungan yang didapatkan dari jarak rata-rata antara setiap bangunan dengan bangunan lainnya. Hal ini akan menunjukkan kerapatan bangunan yang terjadi pada daerah penelitian. Hal ini merupakan salah satu indikator untuk melihat penurunan kualitas lingkungan yang terjadi pada daerah penelitian.

Berdasarkan konsep pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan Departemen Pekerjaan Umum (2006) jarak antar bangunan terbagi menjadi tiga yakni a) untuk kawasan dengan jarak antar bangunan kurang dari 1,5 meter, b) untuk kawasan dengan jarak antar bangunan antara 1,5 sampai 3 meter, c) kawasan dengan jarak antar bangunan lebih dari tiga meter.

2) Kondisi Kependudukan

a) Tingkat Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu dibandingkan luas wilayah yang dihuninya, dengan kata lain kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk disuatu wilayah untuk setiap satuan luas (BPS Kota Padang, 2010).

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Jadi, kepadatan penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah/ satuan luas.

Kepadatan penduduk diukur dengan menggunakan luas kawasan permukiman dan jumlah bangunan dengan asumsi satu bangunan terdiri dari 5 orang, asumsi ini bersumberkan atas dasar kepadatan penduduk secara umum di Kecamatan Padang Selatan yakni dengan kepadatan 5,82.

Menurut Purwadhi dkk (2002) bahwa penilaian tingkat derajat kekumuhan, kepadatan penduduk dapat digolongkan kepada 3 bagian yakni jarang jika kepadatan penduduk yang ada <50 jiwa/ha, dikatakan sedang apabila kepadatan penduduk sebesar 50-150 jiwa/ha dan dikatakan padat jika kepadatan penduduk >150 jiwa/ ha.

b) Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jenjang pendidikan formal dari pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi (PT).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 mengatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua. Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi.

Pendidikan yang akan di nilai dengan menggunakan persentase jumlah kepala keluarga yang menamatkan wajib belajar 9 tahun, hal ini dapat

dikarenakan pendidikan dapat menjadi cerminan kualitas hidup seseorang, semakin tinggi pendidikan diasumsikan seseorang tersebut semakin baik kualitas hidupnya. Begitu juga dalam pemahaman dan pengetahuan terhadap pentingnya kesehatan lingkungan, seseorang dengan pendidikan baik akan lebih cakap dalam menghadapi setiap permasalahan terutama sikap aktif dalam menjaga lingkungan yang sehat.

3) Prasarana

a) Kondisi Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menjelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Menurut Departemen Pekerjaan Umum Dirlin Bina Marga (1992) kondisi jalan dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

- (1) Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan.
- (2) Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan.

- (3) Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan.
- (4) Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya dan terkelupas yang cukup besar disertai dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur dan sebagainya.

Jalan juga dapat diklasifikasikan sesuai peranannya sebagai berikut :

- (1) Jalan Arteri Primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, memiliki lebar jalan minimal 11 meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata, jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi.
- (2) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, kecepatan rencana minimal 40 km/ jam, lebar jalan minimal 9 meter.
- (3) Jalan Lokal Primer yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan, kecepatan minimal 20 km/jam, memiliki lebar jalan

minimal 7,5 meter dan jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

- (4) Jalan Lingkungan Primer yang menghubungkan kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan dalam lingkungan kawasan perdesaan, kecepatan minimal 15 km/ jam, lebar jalan minimal 6,5 meter.
- (5) Jalan Arteri Sekunder yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke satu, kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder ke satu lainnya, atau kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder ke dua, lebar jalan minimal 11 meter dengan kecepatan minimal 30 km/ jam.
- (6) Jalan Kolektor Sekunder yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga, kecepatan minimal 20 km/ jam, lebar jalan minimal 9 meter.
- (7) Jalan Lokal Sekunder yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan, kecepatan minimal 10 km/ jam dengan lebar jalan minimal 7,5 meter.
- (8) Jalan Lingkungan Sekunder, menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan, kecepatan minimal 10 km/ jam, lebar jalan minimal 6,5 meter.

b) Drainase

Drainase adalah usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas (Suripin, 2004). Pada prinsipnya drainase terbagi atas dua macam yaitu drainase untuk daerah perkotaan dan drainase untuk daerah pertanian.

Sistem jaringan drainase adalah sistem jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pengaliran air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (*inundation*) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administrasi kota. Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaannya, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh pemerintah Kota/Kabupaten yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010). Menurut Maryono (2008) drainase memiliki berbagai fungsi sebagai berikut:

- 1) Membebaskan suatu wilayah (terutama yang padat pemukiman) dari genangan air atau banjir.
- 2) Drainase juga dipakai untuk pembuangan air rumah tangga. Semua sistem aliran pembuangan rumah dialirkan menuju sistem drainase.

Menentukan dimensi sistem drainase, intensitas hujan dengan periode ulang tertentu disuatu sistem jaringan drainase dipakai sebagai dasar.

c) Sumber Air Minum

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 menyatakan bahwa air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sedangkan menurut Dirjen PPM PLP Departemen Kesehatan RI, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak. Sedangkan air minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Budiman, 2012). Menurut Budiman (2012) Untuk dikatakan sebagai air bersih, air harus memenuhi beberapa persyaratan yakni:

- 1) Syarat Fisik dari air bersih yaitu:
 - a. Tidak berbau
 - b. Tidak berwarna
 - c. Tidak berasa
 - d. Terasa segar.
- 2) Syarat Kimia dari air bersih yaitu:
 1. Derajat keasaman antara 6,5-9,2.
 2. Tidak boleh ada zat kimia berbahaya (beracun)

3. Unsur kimiawi yang diizinkan tidak boleh melebihi standar yang telah ditentukan.
 4. Unsur kimiawi yang disyaratkan mutlak harus ada dalam air.
- 3) Syarat bakteriologis dari air bersih yaitu:
- a) Tidak ada bakteri/virus kuman berbahaya (patogen) dalam air.
 - b) Bakteri yang tidak berbahaya namun menjadi indikator pencemaran tinja (*Coliform Bacteria*) harus negatif.
 - c) Syarat radioaktif, tidak ada zat radiasi yang berbahaya dalam air.

d) Saluran MCK/Limbah Padat

Limbah adalah semua benda yang berbentuk padat (*solid wastes*), cair (*liquid wastes*), maupun gas (*gaseous wastes*), merupakan bahan buangan yang berasal dari aktivitas manusia secara perorangan maupun hasil aktivitas kegiatan lainnya diantaranya industri, rumah sakit, laboratorium, reaktor nuklir dll (Suyono dan Budiman, 2012). Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota menjelaskan macam-macam limbah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Air Limbah dari Sumber Rumah Tangga

Terdiri dari *black water* dan *grey water*. *Black water* adalah tinja, urine, air pembersih setelah buang air besar, air penggelontor, dan kertas pembersih (tisu). *Grey water* terdiri dari air bekas mandi, cucian dapur dan air bekas pencucian pakaian.

b. Air Limbah dari Sumber Komersial, Jasa dan Industri yang Tidak Berpolusi

Air limbah ini dihasilkan dari pembersihan umum misalnya pembersihan lantai dan lainnya. Sisa proses yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran dari kantin/restoran dan air pendingin yang terdapat pada bangunan besar volumenya cukup besar). Air limbah dari kelompok ini umumnya tercampur juga dengan *black water*.

- c. Air Limbah dari Institusi Medis (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan Laboratorium).

Air limbah dari institusi medis meliputi ‘black water’ ditambah air limbah dari layanan medik (ruang operasi dan laboratorium, serta air pendingin.

- d. Air Limbah dari Industri dan Jasa yang Menimbulkan Polusi

Adapun yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah air limbah yang dihasilkan industri rumah tangga seperti batik, tahu, rumah potong hewan dan kegiatan sejenis. Berdasarkan kelompok tersebut dihasilkan “*black water*”, fasilitas produksi (pembersihan ruang kerja, sisa air hasil proses), fasilitas umum (pembersihan umum, kantin/restoran) dan sumber lain.

Penelitian ini di fokuskan pada air limbah rumah tangga, yakni limbah padat, yakni bagaimana kepemilikan dari jamban/wc dan kemana saluran pembuangan dari jamban/wc tersebut.

e. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang

berbentuk padat. Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Menurut Sukarni (1994), terdapat dua jenis sampah yakni:

- a. *Garbage*: sisa pengolahan atau sisa makanan yang dapat membusuk.
- b. *Rubbish*: sampah yang tidak mengalami pembusukan misalnya gelas/kaca, plastik dan juga kayu.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 menjelaskan sampah yang dikelola terdiri atas:

1) Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga yakni sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah plastik.

2) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.

3) Sampah Spesifik

Sampah spesifik adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, timbul secara tidak priodik dan secara teknologi belum dapat diolah.

Menurut Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota, macam-macam sampah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Sampah dari Sumber Rumah Tangga

Sampah dari sumber rumah tangga meliputi sampah organik, sampah anorganik yang dapat didaur ulang, serta sampah lain yang sama sekali tidak bisa didaur ulang seperti baterai bekas, dan sebagainya. Jenis sampah ini disebut “sampah domestik”.

2) Sampah dari Komersial

Pada umumnya sampah dari komersial juga termasuk sampah domestik.

3) Sampah dari Institusi Medis (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan Laboratorium)

Sampah domestik yang kemungkinan tercampur sampah medis (*infectious* dan *patologis*). Sampah medis menjadi tanggung jawab masing-masing penghasil limbah tersebut, tetapi dibanyak tempat ditemukan sampah medis yang tercampur dengan sampah domestik.

4) Sampah dari Industri dan Jasa yang Menimbulkan Polusi

Sampah industri menjadi tanggung jawab masing –masing industri, namun untuk kelas industri rumah tangga tanggung jawab tersebut belum jelas. Sampah yang dihasilkan dari kelompok ini adalah sampah domestik ditambah sampah yang tidak “*biodegradable*” dan sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang memerlukan penanganan tersendiri yaitu jenis sampah yang tidak bisa disatukan pembuangannya dengan sampah domestik).

3. Sistem Pengeinderaan Jauh

a. Pengertian Penginderaan Jauh

Sutanto (1992) menjelaskan bahwa penginderaan jauh ialah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Alat tanpa kontak langsung ialah alat penginderaan atau sensor yang dipasang pada wahana (*platform*) yang berupa pesawat terbang, satelit, pesawat ulak alik, atau wahana lainnya. Objek yang diindera adalah objek di permukaan bumi, di dirgantara, atau di antariksa. Pengindraannya dilakukan dari jarak jauh sehingga disebut penginderaan jauh.

b. Pengertian Citra

Hornby (1974) dalam Sutanto (1992) menjelaskan ada lima pengertian tentang citra tiga diantaranya sebagai berikut:

1. Citra merupakan keserupaan atau tiruan seseorang atau sesuatu barang, terutama yang dibuat dari kayu, batu dsb.
2. Gambaran mental atau gagasan, konsep tentang sesuatu barang atau seseorang.
3. Gambaran yang tampak pada cermin atau melalui lensa kamera.

Citra penginderaan jauh selanjutnya disingkat dengan citra yang termasuk dalam artian ketiga yaitu citra merupakan gambaran yang terekam oleh kamera atau oleh sensor lainnya.

c. Pengertian Interpretasi Citra

Sutanto (1974) menjelaskan bahwa interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut.

d. Citra Quickbird

1) Pengertian Citra Quickbird

Quickbird merupakan satelit penginderaan jauh yang diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2001 di California, U.S.A yang mulai memproduksi data pada bulan Mei 2002. *Quickbird* diluncurkan dengan 98° orbit sun-synchronous dan misi pertama kali satelit ini adalah menampilkan citra digital resolusi tinggi untuk kebutuhan komersil yang berisi informasi geografi seperti sumber daya alam.

Satelit *Quickbird* mampu untuk men-*download* citra dari stasiun *three mid-latitude* yaitu Jepang, Italia dan U.S (*Colorado*). *Quickbird* juga memperoleh data tutupan lahan atau kebutuhan lain untuk keperluan GIS berdasarkan kemampuan *Quickbird* untuk menyimpan data dalam ukuran besar dengan resolusi tertinggi dan *medium-inclination, non polar orbit*.

2) Spesifikasi Citra Quickbird

Berikut ini spesifikasi *Citra Quickbird* yaitu:

2. Peluncuran pada tanggal 18 Oktober 2001
3. Roket peluncur Delta II
4. Peluncuran Tanggal : 18 Oktober 2001
5. Range waktu Peluncuran : 1851-1906 GMT (1451-1506 EDT)

6. Roket Peluncur : Delta II
7. Lokasi Peluncuran : SLC-2W, Vandenberg Air Force Base, California
8. Orbit Tinggi: 450 km, 98 derajat, sun-synchronous inclination
9. Putaran ke lokasi yg sama : 2-3 hari tergantung posisi Lintang
10. Periode orbit : 93.4 minutes
11. Perekaman Per Orbit : ~128 gigabits (sekitar 57 image area tunggal)
 - a) Lebar Sapuan & Luas Area
 12. Lebar Sapuan : 16.5 kilometer di atas nadir dan kemampuan sapuan tanah : 544 km di pusat daerah lintasan satelit (hingga ~30° off-nadir) Areas of interest
 13. Single Area: 16.5 km x 16.5 km
 14. Strip: 16.5 km x 115 km
 - b) Ketelitian : Kesalahan radius 23 meter, dan kesalahan linear 17 meter (tanpa titik kontrol)
 - c) Resolusi Sensor & Spectral Bandwidth
 15. Pankromatik : 61 centimeter (2 ft) Ground Sample Distance (GSD) pada nadir
 16. Black & White: 445 s/d 900 nanometer
 - d) Multispektral : 2.4 meter (8 ft) GSD pada nadir, Blue: 450 – 520 nanometer, Green: 520 – 600 nanometer, Red: 630 – 690 nanometer, Near-IR: 760 – 900 Nanometer

- e) Dynamic Range : 11-bit per pixel
- f) Kapasitas Penyimpanan : 128 gigabit
- g) Dimensi & Umur Satelit

17. Bobot : 1050 Kg, panjang 3.04-meter (10-ft).

Dengan resolusi spasial yang tinggi, citra satelit Quickbird mampu menyajikan penampakan objek cukup detail dan bisa menampilkan objek hingga skala 1 : 2.500. Adapun Karakteristik dari Citra Quickbird sebagai yaitu Satelit Quickbird, diluncurkan pada bulan Oktober 2001, memperoleh gambar hitam dan putih dengan resolusi 61 cm dan gambar berwarna (4 band) dengan resolusi 2,44 m dengan luas permukaan sebesar 16,5 km x 16,5 km.

3) Pemanfaatan Citra “QUICKBIRD”

a) Bidang Pertanian dan Perkebunan

18. Melakukan observasi pada lahan yang luas, petak tanaman hingga tiap individu tanaman.

19. Melakukan identifikasi jenis tanaman dan kondisi tanah, potensi panen, efektifitas pengairan,

20. kesuburan dan penyakit tanaman, kandungan air.

Secara berkala (*time series*) dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan tanaman, laju perubahan jenis tanaman.

21. Perubahan atau alih fungsi lahan pertanian.

22. Menghitung jumlah pohon dan volume hasil panen komoditi perkebunan.

23. Perencanaan pola tanam perkebunan

24. Perencanaan peremajaan tanaman perkebunan.

b. Bidang Kehutanan

1. Monitoring batas-batas fungsi kawasan hutan

2. Identifikasi wilayah habitat satwa

3. Identifikasi perubahan kawasan hutan akibat illegal logging.

4. Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan

5. Pemetaan kawasan unit-unit pengelolaan hutan

6. Perencanaan lokasi reboisasi.

c. Bagi Unit Pengelolaan Hutan HPH

– Inventarisasi luas lahan HPH

– Menghitung potensi volume kayu

– Perencanaan dan pembuatan site plan

– Perencanaan jalur transportasi logging

– Mengidentifikasi batas kawasan

– Evaluasi laju produksi

d. Bagi unit pengelolaan hutan HTI

– Perencanaan pembagian areal usaha ke dalam bentuk blok, petak dan anak petak

– Perencanaan lokasi *camp*, lokasi menara pengawas, lokasi persemaian, dan lain-lain.

– Monitoring pertumbuhan tanaman dan areal siap panen.

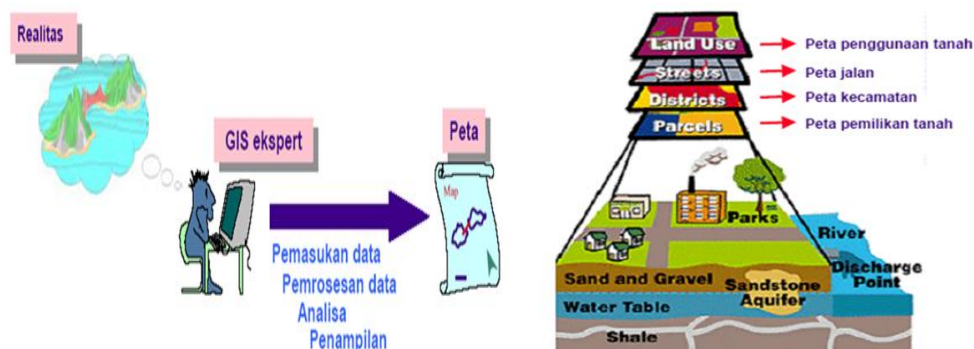
e. Secara Berkala (*Time Series*) Digunakan untuk :

1. Memantau laju kerusakan hutan (*deforestation*)
2. Memantau perubahan lahan pada kawasan hutan
3. Memantau keberhasilan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan)
- f. Bidang Arsitek dan Konstruksi
 1. Desain dan perencanaan tapak konstruksi
 2. Desain dan perencanaan lanskap konstruksi
 3. Perbaikan proses desain
 4. Monitoring proses konstruksi
- g. Bidang Pertambangan dan Energi
 1. Inventarisasi potensi pertambangan
 2. Pemetaan situasi tutupan lahan pertambangan yang akan dibuka
 3. Perencanaan site plan lokasi pertambangan
 4. Inventarisasi lokasi pertambangan liar dan PETI
 5. Monitoring perubahan lahan akibat kegiatan pertambangan terbuka
 6. Monitoring kegiatan rehabilitasi lahan.
 7. Inventarisasi potensi dan perencanaan lokasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
- h. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Wilayah
 1. Pembuatan peta detail penggunaan lahan
 2. Perencanaan tata ruang, DED dan Lanskap pembangunan
 3. Identifikasi dan inventarisasi kawasan-kawasan kumuh
 4. Perencanaan dan manajemen sarana dan prasarana wilayah

5. Pemetaan kawasan rawan bencana alam
6. Pemantauan dan penanggulangan bencana alam
- i. Bidang Entertainment dan Pelatihan
 1. Simulasi Terbang pada pelatihan pilot
- j. Visualisasi 3 dimensi relief permukaan bumi pada industri film
- k. Bidang Pertahanan dan Intelijen
 1. Mendukung Operasi Intelijen
 2. Operasi Tempur
 3. Operasi Territorial
 4. Operasi militer selain perang
- e. Analisis Overlay

Analisis *overlay* merupakan salah satu metode yang handal dalam analisis spasial. *Overlay* beberapa peta merupakan tugas terpenting SIG untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan. Misalnya, SIG digunakan dalam analisis ini untuk memetakan karakteristik permukiman kumuh. Berikut penjelasannya dalam bentuk gambar, yaitu:

Gambar 1. Ilustrasi Analisis Overlay



Sumber: As-syakur, 2009

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan Surtiani (2006) dengan penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota” (Kota Salatiga) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab penurunan kualitas lingkungan Permukiman Kawasan Pancuran adalah disebabkan oleh jumlah penghuni, status kepemilikan, penghasilan, luas lahan dan lama tinggal dengan variabel pengaruh tertinggi adalah tingkat penghasilan dan luas lahan.

Penelitian yang dilakukan Rindarjono (2010) yang berjudul “Perkembangan Permukiman Kumuh di Kota Semarang Tahun 1980 – 2006”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perkembangan permukiman kumuh di Kota Semarang memperlihatkan kondisi kualitas lingkungan yang semakin menurun atau terjadi deteriorisasi, yang secara umum dapat dilihat berdasarkan hal sebagai berikut (1) fasilitas umum yang sudah tidak memadai lagi, (2) kualitas lingkungan yang semakin menurun, (3) sifat *extended family* yang mengakibatkan penambahan ruang bangunan yang asal jadi, (4) proses penuaan, sehingga permukiman kumuh bertambah kusam dalam performannya.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti untuk lebih memperjelas kerangka yang telah disusun oleh penulis, maka penulis berpedoman kepada kerangka konseptual tersebut.

Kawasan permukiman kumuh merupakan suatu kawasan yang kurang layak huni dengan sarana prasarana serta utilitas umum yang kurang memadai. Kawasan permukiman biasanya ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sosial ekonomi yang rendah serta lingkungan yang kurang sehat.

Kondisi bangunan yakni keadaan fisik dari sebuah bangunan yang mengindikasikan terhadap penanganan permukiman kumuh adapun yang akan dilihat dari kondisi fisik bangunan adalah kepadatan bangunan yang dapat dilihat dari jumlah bangunan per luas wilayah, sedangkan jarak antar bangunan dapat dilihat dari rata-rata jarak antara setiap bangunannya.

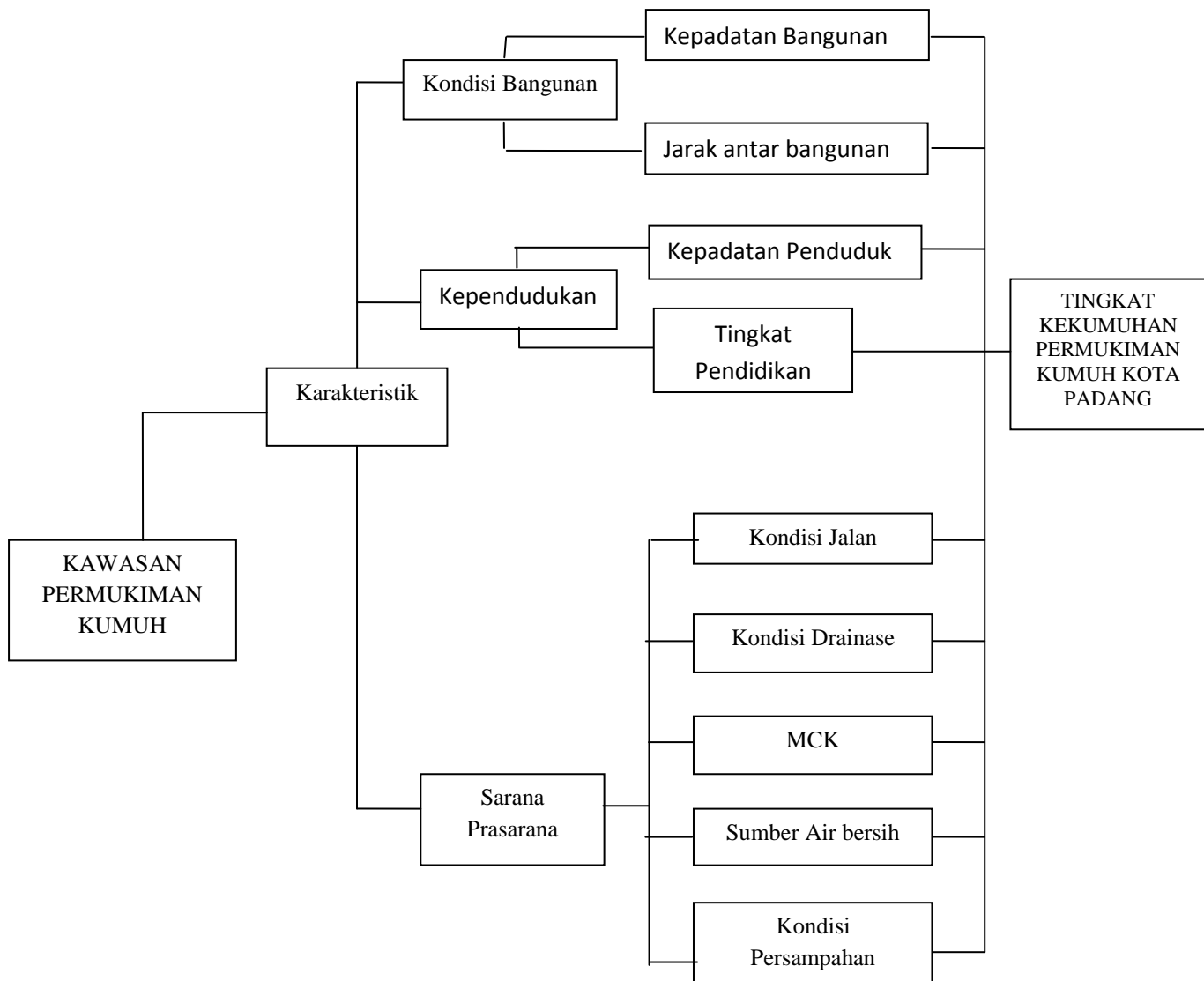
Kondisi kependudukan merupakan gambaran bagaimana karakteristik masyarakat penghuni kawasan permukiman kumuh, adapun yang akan dilihat pada kondisi kependudukan adalah kepadatan penduduk yang dapat dilihat dari jumlah penduduk per satuan wilayah.

Pendidikan menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat kualitas hidup manusia, asumsinya semakin baik tingkat pendidikan seseorang maka semakin cakap dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan kepala keluarga.

Kondisi prasarana yakni kondisi jalan lingkungan dengan melihat jumlah total jalan lingkungan yang rusak dibandingkan dengan panjang total jalan. Kondisi drainase dengan melihat panjang drainase yang tidak tersistem dalam jaringan drainase yang menyebabkan terjadi genangan.

Kondisi air minum dapat dilihat dengan ketersediaan sumber air minum di permukiman kumuh, apakah menggunakan perusahaan air minum, sumur bor

ataupun sungai serta apakah ketersediaannya mencukupi, kurang ataupun melimpah. Kondisi MCK yakni dengan melihat ketersediaan jamban di rumah, umum ataupun sungai serta saluran pembuangan dari jamban tersebut. pengelolaan persampahan yakni dengan melihat tempat pembuangan sampah yang digunakan masyarakat apakah dibakar dibuang ke sungai ataupun pelayanan dari pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka konseptual

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kondisi bangunan, meski tingkat kepadatan dan jarak antar bangunannya tergolong sedang dan rendah namun masih banyaknya bangunan yang sifatnya semi permanen dan bertambah banyaknya bangunan baru dapat menyebabkan kondisi kepadatan bangunan menjadi lebih padat karna densifikasi penduduk yang ada serta bertambah rapatnya jarak antar bangunan dikemudian hari.
2. Kepadatan penduduk yang ada pada kawasan permukiman kumuh tersebut tergolong tinggi hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang ada dalam satu rumah tangga yang peneliti jumpai di lapangan.
3. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga pada kawasan Batang Arau dan Kawasan Seberang palinggam masih rendah sedangkan pada Kawasan Seberang Padang Tinggi
4. Kerusakan jalan yang terjadi pada Kawasan seberang Palinggam pada umumnya rusak ringan, hal ini dikarenakan aliran air hujan yang tidak langsung mengarah pada drainase yang ada menyebabkan genangan sering terjadi ketika hujan turun dan menyebabkan kerusakan pada lapisan permukaan jalan.
5. Kondisi drainase pada Kawasan Batang Arau paling buruk diantara dua kawasan lainnya, hal ini disebabkan oleh tidak berjalannya kegiatan

masyarakat dalam bergotong-royong membersihkan lingkungan dimana mereka tinggal yang menyebabkan terdapat banyaknya saluran drainase yang tersumbat akibat tumpukan sampah serta terjadi genangan dan luapan yang pada akhirnya juga masuk kedalam rumah masyarakat, terlebih ketika hujan turun.

6. Penurunan kualitas lingkungan juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan lingkungan, hal ini ditandai dengan di temukannya masyarakat yang masih mengalirkan saluran jamban pada sungai dan drainase yang terdapat disekitar rumah mereka, hal ini tentunya akan berpengaruh pada kesehatan lingkungan jangka panjang..
7. Sumber air bersih yang ada pada Kawasan Batang Arau dan Kawasan Seberang Palinggam yang masih menggunakan air sumur dan air sungai yang berada pada perbukitan pada umumnya akan mengalami kekurangan ketika musim kemarau sedangkan pada Kawasan Seberang Padang sumber air masyarakat lebih didominasi PDAM sehingga ketersediaan air bersih untuk minum dan kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi meski musim kemarau datang.
8. Perilaku dalam pengelolaan sampah masih belum optimal, nyatanya pada Kawasan Batang Arau masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai dan membakarnya.
9. Penurunan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Padang Selatan dapat dilihat dari tingkat kekumuhannya yang dikategorikan menjadi tiga yakni : berat, sedang dan ringan. Tingkat

kekumuhan berat berada pada kawasan Batang Arau, sedangkan tingkat kekumuhan sedang pada Kawasan Seberang Palinggam dan tingkat kekumuhan ringan berada pada Kawasan Seberang Padang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mengendalikan agar kepadatan penduduk tidak semakin tinggi, maka diharapkan kepada masyarakat untuk tidak menikah di usia muda dan melaksanakan anjuran Pemerintah dalam melaksanakan program KB.
2. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat maka orang tua harus berperan aktif untuk menyemangati dan menumbuhkan kecintaan terhadap anak dalam bidang pendidikan dan diharapkan juga peran pemerintah untuk menyalurkan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Diharapkan masyarakat di Kecamatan Padang Selatan harus lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan mengadakan gotong royong secara berkala untuk menciptakan dan menjaga prasarana yang ada agar tetap berada pada fungsi dasarnya. Untuk masyarakat yang masih mengalirkan pembuangan jamban pada saluran drainase dan sungai agar dapat mengubah pola hidupnya karna hal tersebut akan berdampak pada kesehatan mereka pribadi.
4. Pengelolaan sampah diharapkan melalui usaha bersama yang diwujudkan dengan pengangkutan sampah oleh petugas yang telah disepakati

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Albone, Abdul Azis dkk. 2009. *Metode Penelitian*. Padang: Jihadul Khair Center.
- Bagoes Mantra, Ida. 2009. *Demografi Umum*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Daldjoeni. 2010. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: PT. Alumni.
- Khomarudin. 1997. *Menelusuri pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo.
- Maryono, Agus. 2008. *EKO-HIDRAULIK Pengelolaan Sungai Ramah Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarata: PT Rineka Cipta.
- Nazir, Mohammad. 2009 *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ramadhan, Anugrah. 2012. *Citra Quickbird Penginderaan Jauh*. Biro PP Imahagi Region III.
- Sangadji, Etta Emang dan Sopiah. 2010 *metodologi Penelitian (pendekatan praktis dalam penelitian)*, Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Suparno dan Endi. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Andi.
- Sukarni, Mariyati.1994. *Kesehatan Keluarga dan Lingkungan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suripin. 2004. *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi
- Sutanto. 1992. *Penginderaan Jauh*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suyono dan Budiman, 2012. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara